

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada suatu negara yang pembangunannya bisa di katakan berhasil salah satunya di tentukan oleh kemampuan pemerintahan dalam mengurangi atau meminimalisir tingkat kemiskinan di negara tersebut. Di negara maju sendiri masih terdapat jumlah penduduk yang miskin. Namun dibanding dengan negara berkembang angka kemiskinan sangatlah sulit untuk maju karena ada kesamaan pada tingkat pendapatan nasional yang laju pertumbuhan ekonominya lambat.

Kemiskinan masih merupakan masalah yang dialami seluruh dunia. Masalah kemiskinan ini tidak hanya di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Hal ini karena disamping istilah kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai hidupnya atau memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, namun juga berkaitan dengan adanya ketimpangan diantara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah (Hudiyanto,2014).

Adapun kemiskinan menurut pandangan islam yang termasuk dalam surat QS. Ar – Rum [30/84] :38 yang berbunyi:

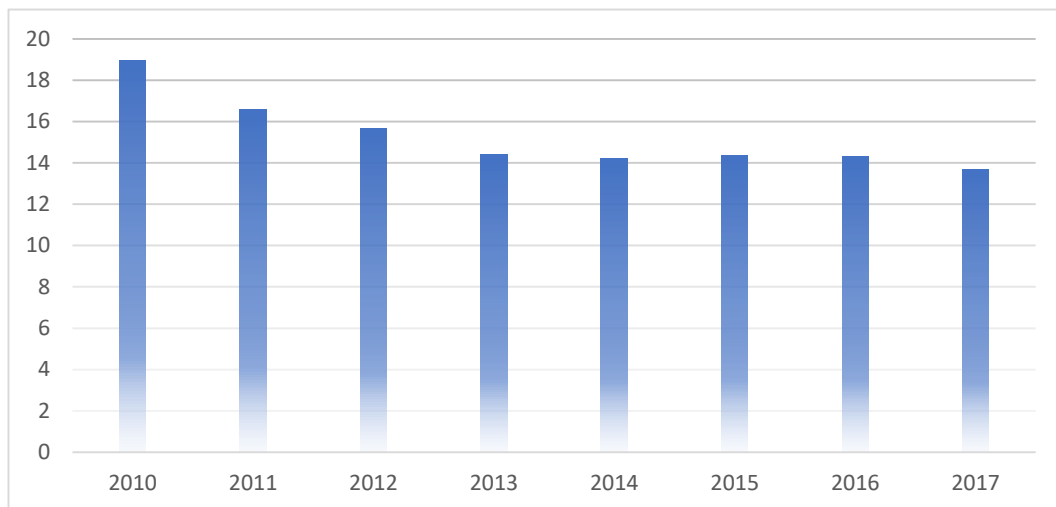
فَاتِذَا الْقُرُؤُا حَفَّتْهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”.

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, papan, dan sandang serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) (Kurniawan, 2018). Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh (Nata dan Ningrum, 2015).

Di Indonesia yang masih di bilang negara berkembang dan memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak luput dari kemiskinan tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin masih banyak tertinggal dari segi pengetahuan dan teknologi khususnya di daerah-daerah desa yang masih sulit terjangkau oleh akses ke kota.

Salah satu daerah Indonesia yang banyak tingkat kemiskinan terdapat di Kabupaten dan kota pada Provinsi Lampung. Hal ini dapat dilihat pada presentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung pada periode 2010-2017 yang di tunjukan pada Grafik 1.1



Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung 2018

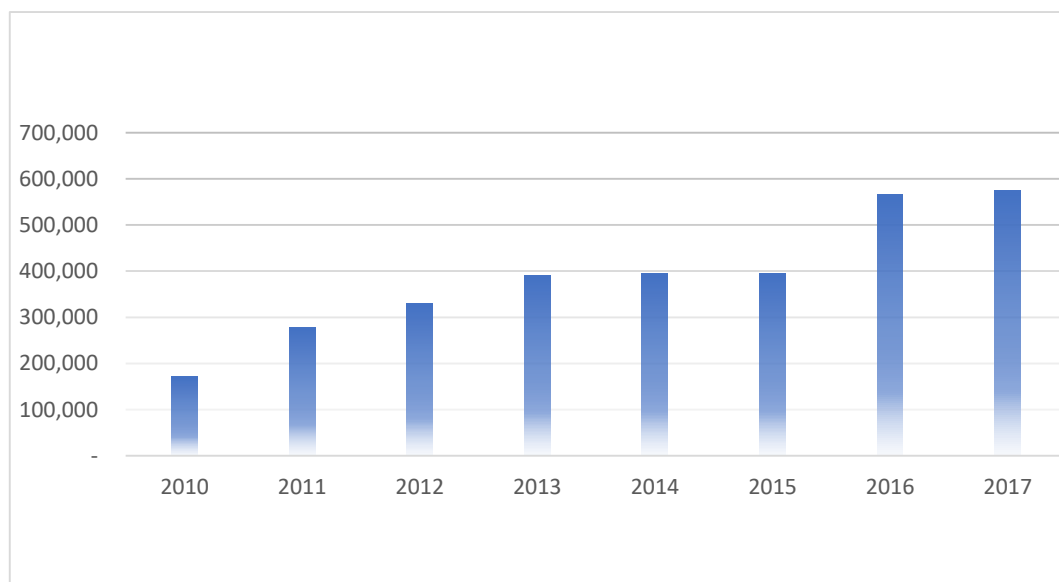
Gambar 1.1

Presentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Lampung pada periode 2010-2017 (Jiwa)

Berdasarkan pada Gambar 1.1 di jelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi lampung pada presentase tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 16,58 persen dari tahun sebelumnya senilai 18,94 persen. Kemudian ditahun berikutnya yaitu 2012 mengalami penurunan sebesar 15,65 persen, di tahun 2013 mengalami penurunan 14,39 persen, lalu tahun 2014 mengalami penurunan 14,21 persen. Namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 14,35 persen dan tahun 2016 terjadi penurunan di angka 14,29 persen di tahun 2017 pun terjadi penurunan lagi di angka 13,69 persen

Pemerintah di Provinsi Lampung sendiri sudah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi jumlah kemiskinan, namun tingkat kemiskinan di Lampung masih diatas 10 persen. Hal ini pun di ketahui dari bulan april 2018, jumlah penduduk miskin di lampung mencapai 1.097,05 ribu orang atau sekitar 13,14 persen bertambah jika di bandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 1.083,74 ribu orang atau sekitar 13,04 persen (BPS,2018).

Terdapat banyak faktor yang di duga mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti hal nya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, upah minimum provinsi dan jumlah penduduk. Kesehatan yang bagus dapat mempengaruhi kinerja pada seseorang, sementara kondisi kesehatan yang buruk dapat menjebak seseorang pada lingkaran kemiskinan. Karena jika kesehatan seseorang berkurang maka akan berpengaruh terhadap kinerja nya. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan itu bisa kita ketahui dengan penjelasan Gambar 1.3 berikut:



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2018

Gambar 1.2

Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada periode 2010-2017 (Juta)

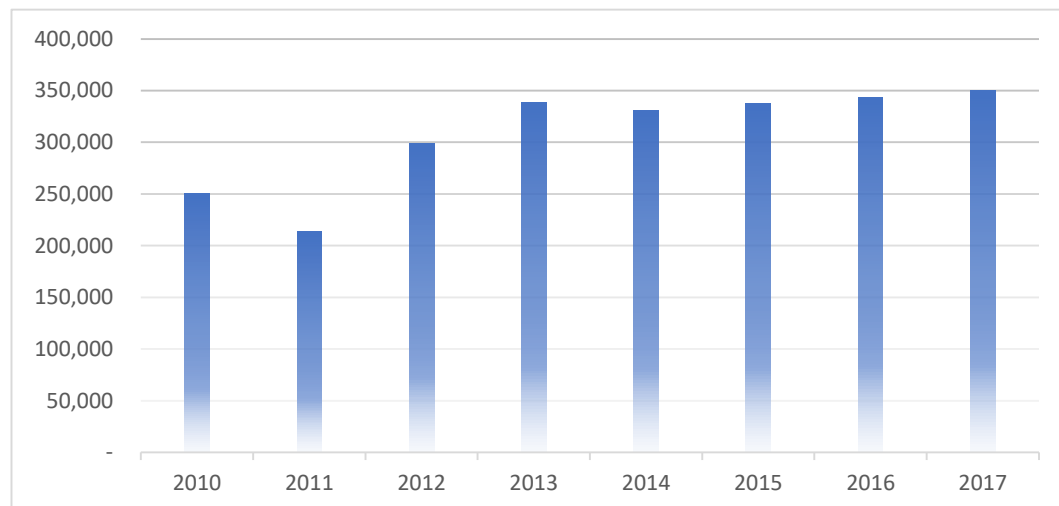
Berdasarkan pada Gambar 1.3 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terus mengalami kenaikan, namun kenakinan pengeluaran pemeritah bidang kesehatan cenderung lambat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2010 dengan jumlah 171 miliar rupiah, lalu pada 2011 mengalami kenaikan 277 miliar rupiah, pada

tahun 2012 mengalami kenaikan 330 miliar rupiah, pada tahun 2013 mengalami kenaikan 331 miliar rupiah, pada 2014 mengalami kenaikan 393 miliar rupiah, lalu pada tahun 2015 mengalami kenaikan 394 miliar rupiah, kemudian tahun 2016 dan 2017 yang mengalami kenaikan paling banyak yaitu 565 miliar rupiah dan 574 miliar rupiah. Hal tersebut menunjukkan hal yang positif dimana setiap tahunnya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Provinsi Lampung pada tahun 2010-2015 mengalami kenaikan sedikit demi sedikit namun pada tahun 2016 dan 2017 meningkat dengan pesat dan berpengaruh terhadap kinerja masyarakat untuk memenuhi kehidupan masyarakat.

Di sisi lain terdapat juga faktor yang mempengaruhi kemiskinan suatu wilayah yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang baik pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat kemiskinan. Di Provinsi Lampung rata-rata lama sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti yang di jelaskan pada Gambar 1.2.

Berdasarkan pada Gambar 1.2 menunjukkan naik turun setiap tahunnya seperti pada Grafik diatas dimana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan Provinsi Lampung mengalami naik turun setiap tahunnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 250 miliar rupiah, pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 213 miliar rupiah, pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 298 miliar rupiah, pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan sebesar 338 miliar rupiah, lalu pada tahun 2014 turun sebesar 331 miliar rupiah, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 337 miliar rupiah, kemudian di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 343 miliar rupiah dan di tahun 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 349 miliar rupiah. Hal

tersebut menunjukkan dimana setiap tahunnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Provinsi Lampung walau selalu mengalami naik turun dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pekerjaan yang layak dan kebutuhan hidup masyarakat.



Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2018

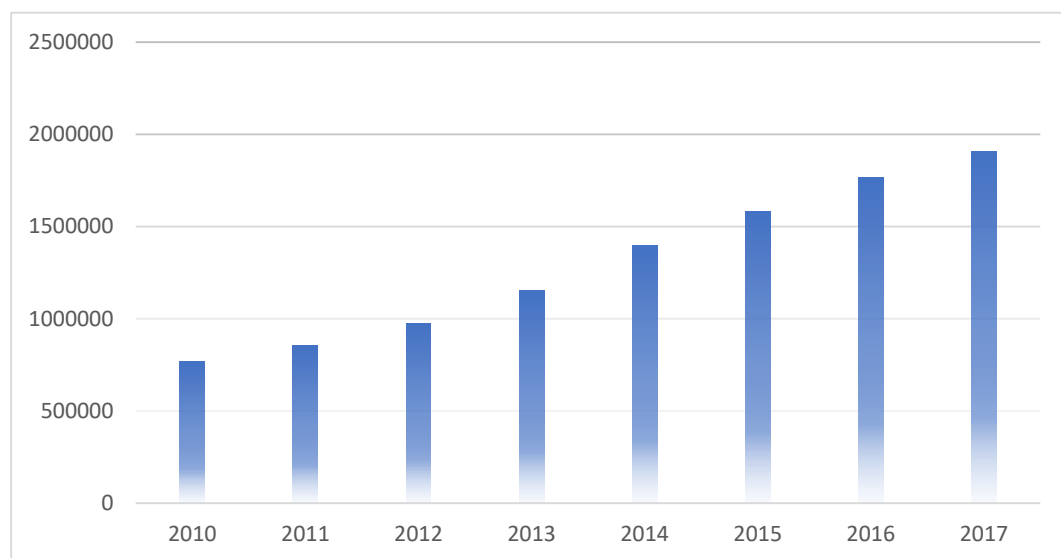
Gambar 1.3

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan di kabupaten/kota Provinsi Lampung pada periode 2010-2017 (Juta)

Tidak hanya itu saja UMP (*Upah Minimum Provinsi*) juga menjadi salah satu factor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu pekerjaan atas dasar suatu perjanjian kerja. (Nasution, 1994).

Untuk membangun suatu perekonomian, kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga kerja harus menjadi pusat perhatian karena merupakan subjek dan objek dari pembangunan. Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang

sangat penting disamping sumber daya alam, modal dan teknologi. Bila ditinjau secara umum, maka tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan mempunyai nilai ekonomis yang dapat berguna bagi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia atau dengan kata lain orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja (Badan Pusat Statistik, 2005). Salah satu nya di Provinsi Lampung tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) pada periode 2010-2017 dapat di lihat pada Gambar 1.4:



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2018

Gambar 1.4

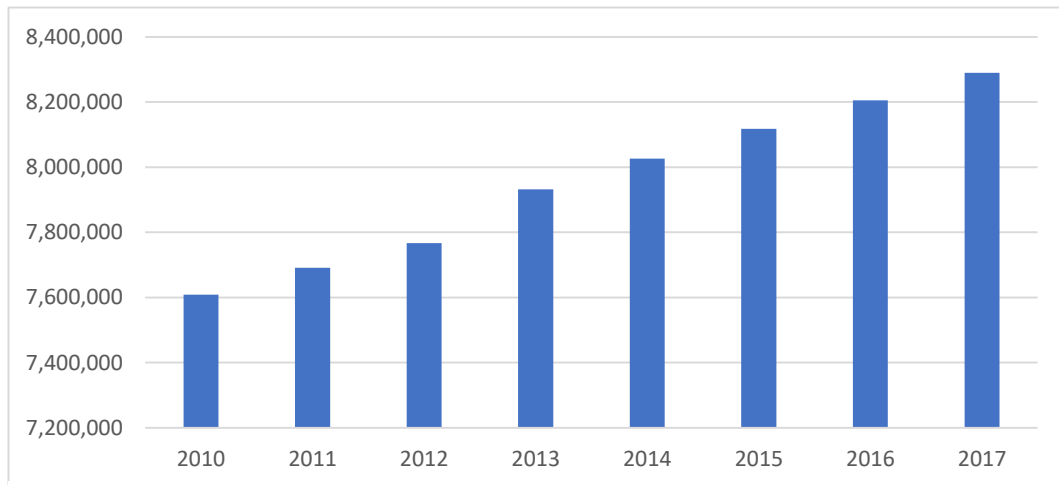
Upah Minimum Provinsi dan rata-rata Nasional pada periode 2010-2017 (Rupiah)

Pada Gambar 1.4 di jelaskan bahwa Upah Minimum Provinsi (*UMP*) mengalami perubahan di setiap tahun nya. Perubahan yang terjadi adalah kenaikan di mulai dari tahun 2010 adalah sebesar Rp 767.500,00, pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 855.000,00, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 975.000,00, lalu di tahun 2013 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 1.150.000,00, di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp

1.399.000,00, pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 1.581.000,00, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.763.000,00, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.908.447,00. Upah Minimum Provinsi (*UMP*) dari tahun ke tahun selalu meningkat dengan konstan, tentu nya ini berdampak positif bagi perekonomian masyarakat dan perekonomian rakyat bisa meningkat secara terus menerus.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan yaitu jumlah penduduk yang tinggi. Menurut Todaro (2000: 236) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Jumlah Penduduk di Provinsi Lampung dapat di lihat dalam Gambar 1.5 yang di ambil dari jumlah penduduk periode 2010-2017.

Berdasarkan pada Gambar 1.5 jumlah penduduk terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2010 dengan presentase 7,60 juta, lalu pada 2011 naik menjadi 7,69 juta, pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 7,76 juta, pada tahun 2013 naik lagi sebesar 7,93 juta, pada 2014 mengalami kenaikan sebesar 8,02 juta, lalu pada tahun 2015 naik lagi menjadi 8,11 juta, kemudian tahun 2016 dan 2017 yang mengalami kenaikan yaitu di angka 8,20 juta dan 8,28 juta.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Gambar 1.5

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung periode 2010-2017 (Jiwa)

Alasan peneliti mengambil tema penelitian di Provinsi Lampung karena banyaknya jumlah penduduk di Provinsi Lampung serta tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung, dengan provinsi terbesar ke-7 dan masih menjadi persoalan penting bagi pemerintah tentang tingkat kemiskinan ini. Guna mengatasi kemiskinan di Provinsi Lampung agar menjadi suatu kebijakan selanjutnya yang lebih efisien dalam mengatasi masalah tingkat kemiskinan tersebut. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: (1) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (2) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (3) Upah Minimum Provinsi (*UMP*) (4) Jumlah Penduduk.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari peneliti di atas bahwa peneliti mempunyai ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan meneruskan beberapa factor yang mempengaruhinya yaitu variable berikut:
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, UMP, Jumlah Penduduk.
2. Penelitian ini di lakukan di 9 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Penelitian ini selama periode 2010 sampai 2017.

C. Rumusan Masalah

Dalam batasan masalah diatas dan uraian latar belakang, maka peneliti dalam penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2010-2017” menimbulkan pertanyaan antara lain

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas maka tujuan yang peneliti hendak capai dalam penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?

2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?
4. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan bermanfaat dan berguna bagi penulis dan pihak lain yang berkepentingan, yaitu:

1. Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Lampung

Dapat menjadi masukan agar bisa mengurangi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

2. Peneliti lain

Dapat menjadi refrensi penelitian selanjutnya dan menjadi acuan untuk penelitian serupa.

3. Masyarakat

Dapat mengetahui kinerja pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.